



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Silvia Islami

Lailul Mursyidah

Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

Pendahuluan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan minimnya lapangan kerja. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Adapun penyebab lain dari kemiskinan itu antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan, redahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta hidup dalam lingkungan yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2024

Provinsi	2022	2023	2024
Aceh	14,75	14,45	14,23
Sumatera Utara	8,33	8,15	7,99
Sumatera Barat	6,04	5,95	5,97
Riau	6,84	6,68	6,67
Jambi	7,70	7,58	7,10
Sumatera Selatan	11,95	11,78	10,97
Bengkulu	14,34	14,04	13,56
Lampung	11,44	11,11	10,69
KEP. Bangka Belitung	4,61	4,52	4,55
KEP. Riau	6,03	5,69	5,37
DKI Jakarta	4,61	4,44	4,30
Jawa Barat	7,98	7,62	7,46
Jawa Tengah	10,98	10,77	10,47
DI Yogyakarta	11,49	11,04	10,83
Jawa Timur	10,49	10,35	9,79
Banten	6,24	6,17	5,84
Bali	4,53	4,25	4,00
NTB	13,82	13,85	12,91
NTT	20,23	19,96	19,48
Kalimantan Barat	6,81	6,71	6,32
Kalimantan Tengah	5,22	5,11	5,17
Kalimantan Selatan	4,61	4,29	4,11
Kalimantan Timur	6,44	6,11	5,78
Kalimantan Utara	6,86	6,45	6,32
Sulawesi Utara	7,34	7,38	7,25
Sulawesi Tengah	12,30	12,41	11,77
Sulawesi Selatan	8,66	8,70	8,06
Sulawesi Tenggara	11,27	11,43	11,21
Gorontalo	15,51	15,15	14,57
Sulawesi Barat	11,92	11,49	11,21
Maluku	16,23	16,42	16,05
Maluku Utara	6,37	6,46	6,32
Papua Barat	21,43	20,49	21,66
Papua	26,80	26,03	17,26
Indonesia	9,57	9,36	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pendahuluan

Dari permasalahan tersebut salah satu program yang digulirkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan yaitu pada UU No. 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setiap bulannya, untuk membeli beras, minyak goreng dan telur, sesuai jumlah dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan. melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang yang sudah berkerja sama dengan bank Penyalur (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri). Tujuan program bantuan sosial tersebut adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan bervariasi, mendorong usaha eceran rakyat, dan diharapkan berdampak dalam peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sasaran penerima dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten atau kota pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan namanya termasuk di dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar keluarga penerima manfaat (KPM) bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Meskipun Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berjalan sejak 2017, program ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dikarenakan ketidaktepatan sasaran masih terjadi, di mana keluarga mampu menerima bantuan, sementara yang tidak mampu justru tidak. Selain itu, Belum maksimalnya kinerja pihak-pihak pemerintahan desa yang terlibat yang menyebabkan penerima manfaat tidak mengetahui informasi dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan dan tidak adanya mesin EDC ATM di E-Warong atau agen yang digunakan untuk transaksi sehingga masih manual atau harus melakukan transaksi ke bank (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri) yang bekerja sama dengan agen BPNT tersebut.

Tabel 1.2

Jumlah penerima bantuan pangan non tunai (PBNT) di desa keboguyang, kec. Jabon kab. Sidoarjo

Tahun	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Keboguyang					
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI
2022	650	650	650	650	650	650
2023	660	660	660	660	660	660
2024	628	628	628	628	628	628

Sumber: diolah dari pemerintahan desa keboguyang, 2024

Teori penelitian

Dengan meninjau teori Implementasi menurut George Edward III menjelaskan implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) ada empat faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor:

- 1). komunikasi
- 2). Sumber daya
- 3). Disposisi
- 4). struktur birokrasi



shutterstock.com - 2590525125

Penelitian terdahulu

1.

Titis Srimurni (2022) “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pada masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.

2.

Kuni Nabila (2021) “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang paham mengenai (PBNT). masih banyak masyarakat yang menganggap pemberian sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) itu sama setiap bulannya, padahal dalam panduan BPNT Umum menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) tersebut senilai Rp110.000,00 setiap bulannya melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

3.

Azizah (2020) “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program masih ada kendala berupa kurang maksimalnya kinerja pihak-pihak yang terlibat yang menyebabkan penerima manfaat tidak mengetahui informasi dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan.

Metode Penelitian

JENIS PENELITIAN

jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif

FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini yaitu, Teori implementasi menurut Edward III yang meliputi:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan informan Bapak Suwandi Iwan Santoso selaku bendahara desa dan Bapak Udin selaku pendamping PBNT.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

SUMBER DATA DATA

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap responden atau subjek yang relevan. Sebaliknya, data sekunder diperoleh dari sumber lain, baik dalam bentuk informasi lisan maupun tertulis.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang telah diperoleh dan dianalisis menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari empat langkah yakni : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

KOMUNIKASI

Proses penyampaian informasi terkait kebijakan dari pihak pembuat kebijakan (pembuat regulasi) kepada pelaksana kebijakan (implementor kebijakan). Menurut Edward III komunikasi mencakup tentang :

- 1. TRANSMISI:** Sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat telah berjalan efektif, karena masyarakat menerima dengan baik penjelasan mengenai kebijakan program dan tata cara penggunaan kartu keluarga sejahtera (KKS).
- 2. KEJELASAN:** Informasi dari petugas dan pendamping sudah jelas, namun kinerja aparat desa belum maksimal, sehingga penerima manfaat sering kali terlambat menerima informasi dan mendadak diminta antri pencairan.
- 3. KONSISTEN:** etugas dan pendamping telah konsisten menyampaikan informasi pencairan BPNT, namun ketidakhadiran pendamping PBNT yang jarang ke kantor desa menyulitkan pembaruan data, sehingga data penerima menjadi kurang valid dan tidak tepat sasaran.

Hasil dan Pembahasan

SUMBER DAYA

Dukungan sumber daya yang cukup dan berkualitas sangat penting agar kebijakan publik dapat terlaksana secara optimal dan mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimaksud mencakup tentang:

1. SUMBER DAYA MANUSIA:

Jumlah petugas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Keboguyang sebanyak empat orang, dan hingga saat ini, tidak terdapat permasalahan yang signifikan. Para petugas pelaksana telah memenuhi kualifikasi yang sesuai, serta memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola program tersebut

2. ANGGARAN:

Alokasi anggaran untuk Program BPNT di Desa Keboguyang bersumber langsung dari APBN dan disalurkan ke rekening tiap KPM melalui prosedur Kartu Keluarga Sejahtera. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

Tabel 3.1
Jumlah Alokasi Anggaran dan Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Penerima (KPM)	Alokasi Anggaran
1.	2022	650	Rp.130.000.000
2.	2023	660	Rp.132.000.000
3.	2024	628	Rp.125.600.000

Sumber: diolah dari pemerintahan desa keboguyang, 2024

Hasil dan Pembahasan

SUMBER DAYA

Dukungan sumber daya yang cukup dan berkualitas sangat penting agar kebijakan publik dapat terlaksana secara optimal dan mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimaksud mencakup tentang:

3. INFORMASI dan KEWENANGAN:

Pemerintah desa bersama pihak terkait membutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai program PBNT, termasuk kriteria penerima, persyaratan, dan prosedur penyaluran dana agar pelaksanaan berjalan lancar. Dalam Pembagian tugas pencairan BPNT di Desa Keboguyang melibatkan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan, Bendahara Desa yang mengelola keuangan dan laporan, serta Pendamping BPNT yang memastikan kelengkapan dokumen, penyaluran bantuan, dan laporan pertanggungjawaban.

4. FASILITAS:

Di Desa Keboguyang belum memiliki mesin EDC ATM sendiri untuk pengambilan dana program PBNT, tetapi adanya di warung agen alip dan haji indah..

Tabel 3.2
Petugas Pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) Desa Keboguyang

No.	Nama	Jabatan
1.	Musa	Kepala Desa/Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Suwandi Iwan Santoso	Bendahara Desa/Pelaksana Dan Penanggung Jawab Anggaran
3.	Udin	Pendamping BPNT
4.	Ainin Fahmiah	Verifikasi Data

Sumber: diolah dari pemerintah desa keboguyang, 2024



Hasil dan Pembahasan

DISPOSISI

Disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat tiga komponen utama yang membentuk disposisi, yaitu :

1. PEMAHAMAN: Perangkat desa keboguyang yang terlibat dalam pembagian program BPNT sudah cukup paham dalam mekanisme tentang program BPNT.

2. RESPON: Dalam melayani masyarakat desa keboguyang petugas perangkat desa dalam merespon masyarakat dinilai sudah cukup baik karena pihak perangkat desa selalu sigap dalam membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi persyaratan pencairan dana program PBNT.

3. KOMITMEN: Petugas perangkat desa sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan transparansi dan profesionalisme, memastikan setiap proses dilakukan secara adil dan sesuai aturan. selalu sigap membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam setiap tahap pencairan bantuan, termasuk memberikan penjelasan yang jelas tentang mekanisme program agar mereka memahami dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi yang jelas dan efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, karena memastikan wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi berjalan baik. Struktur birokrasi dapat diukur melalui

1. FRAGMENTASI:

Pelaksanaan program BPNT di Desa Keboguyang berjalan lancar karena setiap petugas melaksanakan tugas sesuai dengan bagiannya. Tidak ada tanggung jawab yang bertumpu pada satu petugas karena semua pihak, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga distribusi bantuan, telah memahami peran masing-masing.

2. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP):

Program BPNT sudah memiliki petunjuk pelaksanaan atau SOP yang menjadi panduan yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP ini, pemerintah Desa Keboguyang dapat melaksanakan program sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak melenceng dari ketentuan. Panduan ini sangat membantu petugas untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga proses distribusi, agar program berjalan sesuai tujuan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Keboguyang dianalisis melalui empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari segi komunikasi, sosialisasi program oleh perangkat desa sudah berjalan efektif, namun masih ada kendala seperti kurangnya informasi yang diterima oleh penerima manfaat dan minimnya kehadiran pendamping di kantor desa, yang menyebabkan data penerima kurang valid. Dari segi sumber daya, jumlah petugas sudah mencukupi, namun desa belum memiliki mesin EDC sehingga proses pencairan belum optimal. Dalam aspek disposisi, perangkat desa telah memahami mekanisme program dan sigap membantu masyarakat, khususnya dalam proses pencairan. Dalam aspek struktur birokrasi, di Desa Keboguyang sudah berjalan baik dengan pembagian tugas yang jelas dan sesuai peran masing-masing pihak.

Referensi

- [1] A. Wahab and Sudirman, “Persoalan Kemiskinan Perkotaan,” J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum., vol. 6, pp. 230–238, 2023.
- [2] M. Nurjaya et al., “Pusaran Kemiskinan Struktural Di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara,” J. Ilm. Wahana Pendidik., vol. 10, no. 11, pp. 418–429, 2024.
- [3] M. Amar and A. N. Akbar, “Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sangiasseri,” vol. 3, no. 2, pp. 332–338, 2024.
- [4] E. Suryani, L. A. Permadi, and S. Serif, “Identifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di Pulau Lombok: Basis perumusan intervensi kebijakan,” J. Sos. Ekon. dan Hum. p-ISSN, vol. 2461, p. 666, 2019.
- [5] A. R. Sakir, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah,” Indones. J. Intellect. Publ., vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2022.
- [6] P. Julianto, “Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci,” Qawwam Leader’s Writ., vol. 1, no. 1, pp. 38–43, 2020.
- [7] M. Suwatri, H. Handra, and E. Yonnedi, “The Impact of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program on Household Welfare in Indonesia,” J. Manag. ACCOUNTING, Gen. Financ. Int. Econ. ISSUES, vol. 4, no. 1, pp. 155–163, 2024.
- [8] R. Aristin and R. N. Azizah, “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura,” Reformasi, vol. 8, no. 2, p. 120, 2018, doi: 10.33366/rfr.v8i2.1099.
- [9] T. Srimurni and M. Sholihah, “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA DUREN KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG,” vol. 2, no. 4, 2022.
- [10] K. Nabila, P. Suharso, and W. Hartanto, “Implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di desa paleran kecamatan umbulsari kabupaten jember,” J. Pendidik. Ekon. J. Ilm. Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekon. Dan Ilmu Sos., vol. 15, no. 2, pp. 303–309, 2021.
- [11] A. Azizah, “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DIKELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN,” 2020, Universitas islam kalimantan MAB.
- [12] Y. P. Dalimunthe and S. Susilawati, “Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III,” FLORONA J. Ilm. Kesehat., vol. 1, no. 2, pp. 59–64, 2022, doi: 10.55904/florona.v1i2.300.
- [13] S. M. Pratiwi and H. Sukmana, “Implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa mojouruntut kecamatan krembung sidoarjo,” J. Pendidikan, Sains Sos. dan Agama, vol. 8, no. 2, pp. 463–474, 2022.
- [14] E. Mufatiroh, S. Ratnawati, and B. Ananda Kurniawan, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo,” J. Adm. Publik dan Ilmu Komun., vol. 8, no. 2, pp. 151–158, 2021, doi: 10.55499/intelektual.v8i2.7.
- [15] D. E. Nurati, “KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta),” JPAP J. Penelit. Adm. Publik, vol. 2, no. 01, pp. 93–106, 2016, doi: 10.30996/jpap.v2i01.701.

TERIMA KASIH

